

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi

- Amtu Onimus, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 98.
- Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).
- Nur Basuki Winanmo, *penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, yogyakarta, 2008, hlm 65.
- Nur Kholis, Reefani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Impremium, 2013).
- Peter Mahmud, M. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. (Jakarta: Pranada media Group, 2016).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006).
- Sri Praptianingsih dan Fauziyah. *Ilmu Negara*. (Jember, LPPM UNMUH JEMBER, 2016)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI, 2005)
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan II, Jakarta, 1989.

### B. SKRIPSI

- Harum Mukrimah. *Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No.8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang*. (Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018)

### C. JURNAL

M.Rendi,A, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Bidang Pembinaan dan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No.4 Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rizano, implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas cacat dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan negara dan swasta dikota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, *Jurnal*, Volume I No. 2 Oktober 2014, JOM Fakultas Hukum.

Tenan Haryanto,dkk, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, No.2 Tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto.

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso.

#### **E. INTERNET**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. *Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Timur*

<file:///C:/Users/Nanang/Downloads/infodatin-disabilitas.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2020

<http://eprints.ums.ac.id/70229/5/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2020

<http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf> diakses pada tanggal 25 April 2020

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo>

[jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf)

[https://www.academia.edu/25545357/Analisis\\_Pengembangan\\_Ekonomi\\_Wilayah\\_Kabupate](https://www.academia.edu/25545357/Analisis_Pengembangan_Ekonomi_Wilayah_Kabupate)

[n\\_Bondowoso\\_Sebagai\\_Daerah\\_Tertinggal](n_Bondowoso_Sebagai_Daerah_Tertinggal) diakses Tanggal 7 Januari 2021

